

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ade Saptomo, 2007, *Pokok-Pokok Metode Penelitian Hukum*, Unesa University, Surabaya.
- Ayu Desiana, 2013, *Analisis Konsep Pengawasan Ombudsman Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik*, Jambi: Universitas Jambi.
- Aziz Syamsudin, *Ombudsman Republik Indonesia, Merengkuh Keluhan Rakyat 'Menjewe Sang Pejabat'*, (Jakarta: t.p,2009).
- Bryan A. Garner (ed), *Black's Law Dictionary, Eighth Edition*, (St. Paul: Thomson West, 2004).
- Budhi Masturi, 2005, *Mengenal Ombudsman Republik Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Daniel Oran, *Oran's Dictionary of The Law*, 3rd edition, (Canada: West Legal Studies Thomson Learning, 2000).
- Donna Batten (ed), *Gale Encyclopedia of American Law*, 3rd edition, (Farmington Hill: Gale Cengage Learning, 2010).
- Hayat, 2019, *Manajemen Pelayanan Publik*, Depok: Rajagrafindo Persada.
- Lexi J.Moleong, 2018 “ *Metodologi Penelitian Kualitatif*,” PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Nurmayani, *Hukum Administrasi Daerah (Buku Ajaran)*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2009).
- Prayudi, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981).

Saifuddin Azwar, 2009, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Saiful Anwar, *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*, (Gloria Madani Press, 2004).

Soehino, Ilmu Negara, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1998).

Sujanto, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986).

## **B. Peraturan Perundang – Undangan**

Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 2000.

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020  
Tentang

Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Peraturan Ombudsman Republik Indonesia No. 4 Tahun 2010.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 21 tahun 2011 tentang  
Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik  
Indonesia di Daerah.

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan  
Makanan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik  
Indonesia.

Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2017 Tentang  
tata Cara Penerimaan, dan Penyelesaian Laporan.



### C. Jurnal dan Artikel

Bahmid, Et.Al, 2020, "*Peranan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Dalam Memberikan Perlindungan Studi di Kantor Cabang Badan Pengawasan Obat dan Makanan Badan Pengawasan Obat Makanan Tanjungbalai*", Jurnal Ilmu Hukum, Vol.5, No.2, 2020.

Erick, S. Hole "*Pelayanan Publik Melalui Electronic Egovernment Upaya Meminimalisir Praktek Maladministrasi Dalam Meningkatkan Public Service*", Jurnal Sasi Vol. 17. No. 3 (Juli-September 2011)

Fernandus Natanael Situmeang, Upik Hamidah, Marlia Eka Putri AT, "*Peran Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung Dalam Penyelesaian Laporan Atas Dugaan Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik*", Jurnal Hima Han Volume 5, No 2, 2018.

Jamil Bazarah, Ahmad Jubaidi, dan Futum Hubaib, "*Konsep Pelayanan Publik Di Indonesia (Analisis Literasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Indonesia)*". Jurnal Dedikasi Volume 22.

Muslimah Hayati, "*Maladministrasi Dalam Tindakan Pemerintah*", Jurnal Wasaka Hukum, Vol. 9 no. 1, februari 2021.

Nurul Laili Fadhilah, 2015, "*Urgensitas Ombudsman Dalam Pengawasan Pelayanan Publik*", Jember: Universitas Jember, Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan.

#### **D. Internet**

<https://sehatnegeriku.kemkes.go.id>

<https://www.dpr.go.id>

[https://nasional.tempo.co/read/1649239/kasus-gagal-ginjal-akut-ombudsman-sebut-kemenkes-dan-bpom-lakukan-maladministrasi?page\\_num=2](https://nasional.tempo.co/read/1649239/kasus-gagal-ginjal-akut-ombudsman-sebut-kemenkes-dan-bpom-lakukan-maladministrasi?page_num=2)

<https://www.pom.go.id>

<https://www.halodoc.com>

<https://www.alodokter.com>

<https://upk.kemkes.go.id>

